



Analisis Kinerja Keuangan Lembang Sebelum dan Sesudah Implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Toraja Utara

Winta Panimba^{1*}, Astriwati Biringkanae², Helba Rundupadang³, Elisabet Pali⁴

¹⁻⁴Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

*Penulis Korespondensi: imanputrajhulu@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the impact of Village Fund reallocation on the financial performance of lembang (village) governments and public satisfaction in North Toraja Regency, specifically regarding the establishment policy of the Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Empirical phenomena indicate extreme distortions in fiscal priorities, where the Village Fund budget for 111 Lembang was drastically cut by 58% in 2025 and 2026. These allocations were shifted to fund the initial capital of 6 KDMPs, which currently remain stagnant, dormant, and non-operational. Meanwhile, the remaining 105 Lembang have experienced a total standstill in physical outlet construction. This study employs a descriptive and critical comparative quantitative approach to dissect budget realization reports before and after the fund reallocation. The results indicate that this enforced top-down economic structure creates a high opportunity cost, visible in the severe degradation of road infrastructure and public facilities due to a sharp decline in physical capital expenditure. This distorts the principle of social utility (value for money) and triggers widespread public protests, thereby diminishing the moral legitimacy and public satisfaction with the local government. The study concludes with an urgent recommendation for local policymakers to evaluate the cooperative capital moratorium and realign budgeting priorities toward inclusive public infrastructure.*

Keywords: *Infrastructure; Koperasi Desa Merah Putih; Lembang Financial Performance; Public Sector; Village Fund.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengalihan alokasi Dana Desa terhadap kinerja keuangan pemerintahan lembang (desa) dan kepuasan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara, khususnya terkait kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Fenomena di lapangan menunjukkan adanya distorsi prioritas fiskal yang ekstrem, di mana anggaran Dana Desa untuk 111 Lembang dipangkas hingga 58% pada tahun 2025 dan 2026. Alokasi tersebut dialihkan untuk penyertaan modal awal 6 KDMP yang hingga saat ini justru stagnan, mati suri, dan belum beroperasi. Sementara itu, 105 Lembang lainnya mengalami kemandekan total pada pembangunan fisik gerai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan komparatif kritis untuk membedah laporan realisasi anggaran sebelum dan sesudah pengalihan dana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaksaan struktur ekonomi top-down ini menciptakan biaya peluang (opportunity cost) yang mahal, berupa kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas umum akibat penurunan drastis belanja modal fisik. Hal tersebut mendistorsi asas kemanfaatan sosial (value for money) dan memicu gelombang protes yang menurunkan legitimasi moral serta kepuasan publik terhadap pemerintahan lokal. Kesimpulan penelitian ini mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi moratorium modal koperasi dan mengembalikan orientasi penganggaran pada infrastruktur publik yang inklusif..

Kata Kunci: Dana Desa; Infrastruktur; Kinerja Keuangan Lembang; Koperasi Desa Merah Putih; Sektor Publik.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan rural di Indonesia masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam struktur tata kelola ekonomi nasional. Paradoks pembangunan kerap kali muncul ketika kebijakan yang dirancang dari atas (top-down) tidak berkelindan dengan kesiapan ekosistem sosiologis maupun kapasitas manajerial di tingkat tapak. Salah satu instrumen yang kini diandalkan pemerintah untuk memutus rantai ketergantungan fiskal desa adalah optimalisasi Dana Desa yang diarahkan pada pembentukan lembaga ekonomi mikro, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Secara konseptual, KDMP digadang-gadang sebagai akselerator kemandirian fiskal desa yang mampu

mengonsolidasikan potensi lokal serta menciptakan nilai tambah (value for money) bagi kesejahteraan warga pedesaan (Pratama & Wijaya, 2026). Melalui lembaga ini, surplus ekonomi diharapkan dapat berputar di tingkat domestik sehingga memperkuat daya tahan ekonomi wilayah dari guncangan makro.

Namun, implementasi kebijakan ini diakomodasi oleh wilayah dengan karakteristik sosiokultural yang spesifik seperti di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, muncul benturan realitas yang cukup kontradiktif. Di wilayah ini, pemerintahan desa yang dikenal dengan sebutan lembang memegang peranan sentral tidak hanya sebagai kepanjangan tangan birokrasi, tetapi juga sebagai pemangku adat dan pelayan masyarakat lokal. Berdasarkan data di lapangan, pembentukan KDMP di Kabupaten Toraja Utara justru menunjukkan anomali tata kelola keuangan yang memprihatinkan. Hingga saat ini, tercatat baru terdapat 6 KDMP yang berhasil terbentuk secara administratif. Tragisnya, keenam institusi ekonomi tersebut berada dalam kondisi stagnan, mati suri, dan belum menunjukkan adanya aktivitas operasional maupun geliat kegiatan usaha nyata sekecil apa pun di tingkat tapak. Fenomena ini mengindikasikan adanya disfungsi kelembagaan akibat pemaksaan struktur formal tanpa dibarengi dengan kesiapan kapasitas sumber daya manusia (Sukaris & Rahman, 2025).

Permasalahannya bahwa tata kelola ini tidak berhenti pada masalah stagnasi kelembagaan semata, melainkan telah menjalar dan memicu persoalan sosial-ekonomi baru yang langsung mencekik hajat hidup publik. Penyerapan Dana Desa yang dialihkan secara besar-besaran untuk menyuplai modal awal pendirian 6 KDMP tersebut secara langsung telah mengorbankan pos anggaran krusial lainnya, terutama sektor pembangunan infrastruktur fisik desa. Alokasi dana publik yang bersumber dari kas negara yang seharusnya digunakan untuk mendanai pemeliharaan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di berbagai lembang, kini terserap ke dalam entitas koperasi yang belum aktif secara operasional. Berdasarkan perspektif akuntansi sektor publik, pengalihan instrumen keuangan ini menciptakan biaya peluang (opportunity cost) yang teramat mahal yang harus dibayar oleh masyarakat pedesaan (Mardiasmo, 2024).

Dampak dari salah urus skala prioritas fiskal ini mulai dirasakan secara konkret oleh warga Toraja Utara. Perbaikan jalan dan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah lembang berkurang secara drastis, sehingga memicu gelombang protes dan keluhan meluas dari masyarakat lokal. Jalanan yang rusak parah menghambat mobilitas hasil pertanian, menurunkan aksesibilitas layanan kesehatan, dan menaikkan biaya logistik tingkat lokal. Kondisi ini memicu ketegangan sosiologis karena masyarakat menilai bahwa hak

konstitusional mereka atas fasilitas publik yang layak telah dikorbankan demi mengejar target formalitas program ekonomi yang wujudnya belum ada (Fitrianingsih & Yusni, 2025). Ketimpangan alokasi belanja modal ini pada akhirnya menciptakan distorsi kinerja keuangan yang serius pada pemerintahan lembang. Penyerapan anggaran yang tercatat tinggi dan sukses secara administratif dalam laporan pertanggungjawaban operasional ternyata berbanding terbalik dengan asas kemanfaatan sosial yang dirasakan oleh pembayar pajak di tingkat tapak (Wibowo & Siregar, 2025).

Secara teoretis, kegagalan fungsional pada tahap awal kebijakan ini memvalidasi kritik-kritik terdahulu mengenai bahaya institusionalisme mimetik dalam pengelolaan keuangan publik, di mana struktur baru diadopsi hanya demi kepatuhan regulasi kosmetik tanpa adanya kemampuan teknis operasional (Rizal & Abdullah, 2025). Ketika dana publik dibekukan dalam sebuah wadah kolektif yang tidak produktif, yang terjadi bukanlah penguatan ekonomi melainkan stagnasi modal (*capital stagnation*). Aparatur lembang sebagai pengelola keuangan desa menghadapi dilema akuntabilitas; di satu sisi mereka dituntut patuh pada instruksi supradesa untuk mendirikan koperasi, namun di sisi lain mereka gagal mempertahankan kinerja efisiensi alokasi belanja yang menjadi kebutuhan mendasar konstituennya. Konflik kepentingan antara pemenuhan indikator administratif dengan realitas kebutuhan riil warga inilah yang mendegradasi legitimasi moral pemerintahan lokal di mata masyarakatnya (Buntu, 2024).

Fenomena penurunan prestasi kerja aparatur di Kabupaten Toraja Utara tecermin nyata dalam hambatan eksekusi program strategis daerah pada tingkat Lembang (Desa). Berdasarkan data riil di lapangan, sektor keuangan publik di wilayah ini mengalami tekanan hebat di mana anggaran Dana Desa untuk 111 Lembang di Kabupaten Toraja Utara telah dipangkas secara drastis hingga mencapai 58 persen secara berturut-turut pada tahun 2025 dan 2026. Pemotongan anggaran yang ekstrem ini secara langsung melipatgandakan beban kerja mental dan operasional para pegawai Lembang karena mereka dituntut untuk tetap merealisasikan target pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang sangat ketat.

Dampak dari ketidakseimbangan beban kerja dan terbatasnya ruang aktualisasi diri aparatur dalam berinovasi ini terlihat jelas pada mandeknya proyek pembangunan Gerai Koperasi Desa (Kopdes). Dari total 111 Lembang yang ditargetkan, hingga saat ini baru 6 Lembang yang telah menyelesaikan pembangunan fisik gerai Kopdes, pun kondisi tersebut belum dapat beroperasi secara fungsional. Sementara itu, 105 Lembang lainnya sama sekali belum menunjukkan adanya tanda-tanda memulai aktivitas pembangunan gerai fisik. Lambatnya pencapaian target fisik ini menjadi indikator empiris kuat adanya degradasi prestasi

kerja pegawai Lembang yang disebabkan oleh pengelolaan beban kerja yang tidak proporsional serta minimnya ruang aktualisasi kompetensi dalam mengatasi krisis anggaran di tingkat desa.

Oleh karena itu, evaluasi mendalam mengenai kinerja keuangan lembang sebelum dan sesudah adanya pengalihan anggaran ke Program Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi sangat krusial untuk diteliti secara empiris. Riset ini tidak lagi sekadar melihat angka kepatuhan serapan anggaran di atas kertas, tetapi secara kritis membedah bagaimana perubahan orientasi fiskal tersebut mendistorsi keadilan alokasi publik di Kabupaten Toraja Utara. Melalui analisis komparatif yang tajam, diharapkan dapat diungkap seberapa besar dampak penurunan belanja infrastruktur jalan terhadap penurunan kepuasan publik serta penurunan performa efisiensi anggaran lembang. Penelitian ini penting dilakukan sebagai landasan ilmiah bagi para pengambil kebijakan daerah untuk segera merumuskan langkah mitigasi risiko, melakukan evaluasi moratorium modal, serta mengembalikan hak pengelolaan dana desa ke jalur yang semestinya, yakni pembangunan infrastruktur yang responsif gender, inklusif, dan berorientasi pada hajat hidup masyarakat banyak.

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Turnover Intention

Kinerja Keuangan Lembang (Pemerintahan Desa)

Kinerja keuangan organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan desa yang di Toraja Utara dikenal dengan istilah lembang, bukan sekadar cerminan angka dalam laporan pertanggungjawaban. Lebih dari itu, kinerja keuangan merupakan perwujudan dari kontrak sosial antara pemangku kebijakan dengan masyarakat lokal. Menurut Mardiasmo (2024), pengukuran kinerja keuangan di sektor publik sangat esensial untuk menilai sejauh mana aparaturnya mampu mengelola sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam ekosistem pemerintahan desa saat ini, evaluasi keuangan tidak lagi terbatas pada penyerapan anggaran semata, melainkan pada penciptaan nilai tambah (*value for money*) bagi kesejahteraan warga setempat. Keberhasilan tata kelola ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan asli desa, ketepatan alokasi belanja, serta kapasitas adaptasi lembaga dalam menghadapi perubahan kebijakan ekonomi makro.

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Relevansinya

Koperasi pada hakikatnya merupakan suatu perekonomian yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai stimulus kelembagaan baru yang dirancang untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem manajemen yang lebih modern dan inklusif. Berdasarkan perspektif

Stewardship Theory, pengurus koperasi dan perangkat lembang bertindak sebagai steward yang memiliki motivasi mendasar untuk bertindak demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi semata. Sinergi antara KDMP sebagai pilar ekonomi usaha dan lembang sebagai regulator lokal diharapkan mampu menciptakan efek multiplikasi (*multiplier effect*) terhadap kemandirian fiskal desa melalui optimalisasi dana desa dan pembagian surplus usaha yang berwujud nyata.

Stewardship Theory dalam Perspektif Kritis Alokasi Anggaran

Dalam koridor akuntansi sektor publik, Stewardship Theory mengasumsikan bahwa perangkat pemerintahan lembang bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat (Mardiasmo, 2024). Namun, ketika sebuah kebijakan top-down seperti KDMP dipaksakan tanpa kesiapan ekosistem lokal, peran steward tersebut mengalami desentralisasi dilematis.

Pengalihan dana desa secara masif untuk menyuntik modal entitas yang nyatanya belum siap beroperasi dan belum memiliki kegiatan ini menciptakan biaya peluang (*opportunity cost*) yang sangat mahal. Biaya sosial tersebut berwujud nyata dalam bentuk terbengkalainya pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur dasar pedesaan (Wibowo & Siregar, 2025). Di wilayah dengan topografi berbukit seperti Kabupaten Toraja Utara, akses jalan yang layak merupakan urat nadi bagi mobilisasi komoditas pertanian dan sektor pariwisata lokal.

Ketika anggaran publik yang terbatas dibekukan dalam lembaga koperasi yang mati suri, prinsip pelayanan prima (*value for money*) otomatis runtuh. Akibatnya, pertanggungjawaban keuangan lembang secara moral mengalami delegitimasi di mata publik. Kegagalan menghadirkan pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat memicu hilangnya kepercayaan (*trust*) warga adat terhadap akuntabilitas tata kelola keuangan yang dijalankan oleh pemerintahan lembang (Buntu, 2024; Pratama & Wijaya, 2026). Berdasarkan tinjauan kritis terhadap ketimpangan alokasi belanja tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan signifikan pada efektivitas alokasi belanja infrastruktur dan efisiensi kinerja keuangan lembang sebelum dan sesudah pengalihan dana ke Program Koperasi Desa Merah Putih.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif untuk mengevaluasi dampak dari pergeseran sebuah kebijakan fiskal secara objektif melalui analisis perbandingan sebelum dan sesudah peristiwa (*before-after comparison*).

Pendekatan komparatif ini dinilai paling relevan karena mampu mengisolasi dampak dari intervensi regulasi baru secara longitudinal pada subjek amatan yang sama (Kurniawan, 2026). Pendekatan ini secara khusus diaplikasikan untuk menyoroti fenomena tata kelola keuangan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan membandingkan potret kinerja keuangan lembaga pemerintahan desa yang dikenal secara lokal dengan istilah lembang.

Dalam mendeteksi anomali realisasi anggaran tersebut, pembagian lini masa pengamatan dikelompokkan secara ketat ke dalam dua periode yang kontras. Periode pertama mencakup rentang tahun 2021 hingga 2022, sebuah masa di mana alokasi Dana Desa masih difokuskan secara penuh untuk mendanai pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur fisik dasar. Periode kedua mencakup rentang tahun 2024 hingga 2025, sebuah masa di mana orientasi anggaran mengalami perubahan drastis akibat dialihkannya distribusi keuangan desa demi menyuplai modal awal Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Penentuan batas waktu ini sengaja mengosongkan tahun 2023 sebagai masa transisi guna menghindari bias data operasional akibat di Kabupaten Toraja Utara.

Keenam lembang ini dipilih karena memiliki karakteristik anomali yang homogen, yakni secara administratif dan hukum telah resmi menyerap serta membekukan Dana Desa untuk pos anggaran koperasi, namun secara faktual belum menginisiasi kegiatan operasional, unit usaha, ataupun aktivitas kelembagaan apa pun di tingkat tapak hingga periode pengamatan berakhir. Sifat homogenitas masalah ini penting agar analisis komparatif tidak bias oleh faktor eksternal di luar variabel pengalihan anggaran (Gozali, 2024).

Melalui pengkondisian sampel yang spesifik ini, peneliti dapat melihat variabel yang tidak signifikan, sehingga mampu mengukur secara aktual seberapa besar dampak pembekuan dana ekonomi tersebut terhadap distorsi efisiensi belanja publik dan penurunan drastis kualitas infrastruktur jalan pedesaan. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Dana Desa diperoleh secara legal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kabupaten Toraja Utara.

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis non-parametrik Wilcoxon Signed-Rank Test. Pilihan uji ini diambil sebagai langkah antisipatif yang matang mengingat ukuran sampel wilayah yang bersifat spesifik ($N = 6$) umumnya tidak memenuhi asumsi sebaran data berdistribusi normal yang dipersyaratkan oleh uji parametrik (Kurniawan, 2026). Melalui rangkaian prosedur metodologis yang tersusun secara sistematis dan kritis ini, hasil komparasi yang diperoleh diharapkan mampu menjawab tuntas paradoks penurunan belanja infrastruktur akibat realisasi KDMP yang masih berjalan, sekaligus memberikan simpulan

ilmiah yang valid dan akuntabel bagi perbaikan arah kebijakan tata kelola keuangan desa di masa depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Analisis terhadap karakteristik responden dalam penelitian ini memberikan gambaran demografis yang esensial mengenai profil para pengelola anggaran di 6 lembang sampel Kabupaten Toraja Utara yang menjadi lokus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Responden dalam studi ini mencakup aparatur inti pemerintah lembang seperti Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Bendahara serta perwakilan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) yang secara langsung terlibat dalam proses pengalihan pos anggaran belanja desa. Profil demografis menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif antara 35 hingga 50 tahun. Kisaran usia ini mencerminkan kematangan birokrasi di tingkat tapak, namun di sisi lain juga mengindikasikan adanya kekakuan tertentu dalam mengadopsi transformasi kelembagaan ekonomi baru yang dipaksakan secara instan dari struktur supradesa.

Jika ditinjau dari latar belakang tingkat pendidikan formal, sebagian besar responden telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sarjana (S1) dan Diploma, khususnya dalam bidang ilmu sosial, hukum, dan administrasi pemerintahan. Tingkat pendidikan yang memadai ini secara teoretis menjadi modal penting bagi aparatur desa untuk memahami regulasi fiskal yang kompleks. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang nyata; meskipun mereka memiliki pemahaman administrasi pemerintahan yang baik, mayoritas responden mengaku tidak memiliki latar belakang pengetahuan teknis maupun sertifikasi di bidang manajemen koperasi komersial. Keterbatasan kapasitas manajerial inilah yang menjadi salah satu faktor hulu mengapa 6 KDMP yang telah didirikan dan disuntik modal tersebut tetap berada dalam kondisi stagnan serta belum mampu menjalankan aktivitas bisnis apa pun.

Lebih lanjut, karakteristik responden berdasarkan masa jabatan memperlihatkan bahwa lebih dari 65 persen aparatur lembang telah mengabdikan selama lebih dari satu periode pemerintahan (di atas 5 tahun). Pengalaman yang panjang di tingkat lokal ini membuat mereka sangat memahami karakteristik sosiologis masyarakat adat serta urutan prioritas kebutuhan warga binaannya, khususnya kebutuhan mendesak akan akses jalan yang layak (Nugroho & Pratama, 2024). Pola demografis ini menegaskan adanya tekanan psikologis dan dilema moral yang mendalam di kalangan aparatur. Sebagai pamong lokal, mereka sadar bahwa mengalihkan Dana Desa untuk entitas koperasi yang belum siap beroperasi akan mengorbankan perbaikan

jalan desa yang rusak, namun posisi mereka sebagai bawahan birokrasi memaksa mereka untuk tetap patuh pada target administratif pembuatan KDMP tersebut demi menghindari sanksi kepatuhan dari pemerintah daerah (Sukaris & Rahman, 2025; Wibowo & Siregar, 2025).

Tabel 1. Profil Demografis Aparatur Pengelola Anggaran 6 Lembang Sampel.

No	Karakteristik Responden	Kategori Kelompok	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Jabatan Struktural	Kepala Lembang / Lembang	6	20,00%
		Sekretaris & Bendahara Lembang	12	40,00%
		Anggota BPL / Tokoh Adat	12	40,00%
2	Tingkat Pendidikan	SMA / Sederajat	4	13,33%
		Diploma (D3)	8	26,67%
		Sarjana (S1) / Pascasarjana	18	60,00%
3	Masa Jabatan Birokratis	< 3 Tahun	3	10,00%
		3 – 5 Tahun	7	23,33%
		> 5 Tahun	20	66,67%
4	Latar Belakang Pelatihan Koperasi	Sudah Pernah Pelatihan	2	6,67%
		Belum Pernah Pelatihan	28	93,33%
Total Responden (N)			30	100,00%

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian empiris terhadap pergeseran postur fiskal akibat kebijakan pengalihan anggaran Dana Desa ke Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Toraja Utara diawali dengan melakukan analisis statistik deskriptif. Langkah ini krusial untuk memetakan deviasi angka riil Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 6 lembang sampel sebelum kebijakan diberlakukan (periode amatan 2021–2022) dan sesudah kebijakan dioperasikan secara administratif (periode amatan 2024–2025).

Berdasarkan hasil tabulasi data sekunder yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara, ringkasan nilai deskriptif dari variabel Efektivitas Belanja Infrastruktur Jalan dan Rasio Efisiensi Biaya Operasional Lembang disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 2. Rangkuman Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan Lembang.

Indikator Keuangan		Periode Pengamatan	Minimum	Maksimum	Rata-Rata (Mean)	Standar Deviasi
Efektivitas Infrastruktur	Belanja	Sebelum (2021–2022)	84,12%	96,50%	89,35%	4,12%
		Sesudah (2024–2025)	18,50%	31,20%	24,15%	5,40%
Rasio Efisiensi Operasional	Biaya	Sebelum (2021–2022)	68,40%	82,15%	74,30%	3,85%
		Sesudah (2024–2025)	102,15%	114,80%	108,65%	6,10%

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

Paparan data pada Tabel 3 menyingkap fakta empiris yang sangat memprihatinkan mengenai penurunan kapasitas belanja publik desa. Rata-rata (mean) efektivitas alokasi anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengerasan jalan pedesaan sebelum adanya program KDMP berada pada angka yang sangat optimal, yaitu mencapai 89,35%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada rentang tahun 2021–2022, pemerintahan lembang secara konsisten menempatkan pemenuhan hak akses mobilitas masyarakat adat sebagai skala prioritas pembangunan yang utama.

Namun, potret tersebut berubah drastis pada rentang tahun 2024–2025. Pasca-adanya instruksi penyertaan modal awal untuk pendirian organisasi koperasi tingkat tapak, rata-rata efektivitas belanja infrastruktur anjlok ke level yang sangat kritis, yakni hanya tersisa 24,15%. Pembatasan alokasi belanja infrastruktur fisik ini secara matematis menjawab keluhan meluas dari warga desa, karena hampir tiga perempat anggaran pembangunan jalan telah dipotong secara paksa.

Di sisi lain, parameter Rasio Efisiensi Biaya Operasional Lembang memperlihatkan lonjakan yang tidak wajar. Sebelum intervensi program ekonomi pusat tersebut masuk, rata-rata rasio efisiensi berada di angka 74,30%, yang secara teknis berada dalam koridor sangat efisien (makin kecil rasio, makin efisien penggunaan anggaran). Namun, pasca-tahun 2024, nilai rata-rata rasio tersebut membengkak hingga menembus batas psikologis akuntansi sektor publik, yaitu 108,65%. Pembengkakan rasio di atas 100% ini menjadi sinyal merah adanya kondisi inefisiensi yang akut, di mana pengeluaran total lembang melebihi kapasitas pendapatan riil akibat adanya kewajiban transfer modal ke entitas KDMP yang secara operasional belum menghasilkan imbal balik ekonomi bagi desa.

Pengujian Normalitas Data

Sesuai dengan cetak biru metodologi yang telah ditetapkan, pemilihan jenis uji komparatif harus didasarkan pada karakteristik sebaran data melalui uji normalitas Shapiro-Wilk. Pilihan metode ini didasarkan pada argumentasi bahwa Shapiro-Wilk memiliki tingkat akurasi dan sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kolmogorov-Smirnov ketika dihadapkan pada ukuran sampel kecil, yaitu di bawah 50 unit amatan (Mishra et al., 2019). Hasil pengujian normalitas terhadap kedua variabel pengamatan dirangkum dalam Tabel 5.

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas Shapiro-Wilk.

Variabel Penelitian	Periode Pengamatan	Statistik	df	Signifikansi (p-value)	Kesimpulan Sebaran
Efektivitas Infrastruktur	Sebelum (2021–2022)	0,782	6	0,022	Tidak Normal
	Sesudah	0,795	6	0,029	Tidak Normal

Rasio Efisiensi Operasional	Biaya	(2024–2025) Sebelum (2021–2022)	0,810	6	0,038	Tidak Normal
		Sesudah (2024–2025)	0,764	6	0,015	Tidak Normal

Sumber: Output SPSS Diolah (2026)

Berdasarkan output statistik pada Tabel 3, seluruh nilai signifikansi (p-value) dari kedua variabel pada periode sebelum maupun sesudah program menunjukkan angka yang berada di bawah ambang batas alpha 0,05 ($p < 0,05$). Secara metodologis, hasil ini menolak asumsi keterpenuhan distribusi normal formal (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Ketidaknormalan sebaran data keuangan sektor publik di tingkat desa ini jamak terjadi akibat adanya volatilitas realisasi dana transfer daerah serta pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun anggaran. Konsekuensinya, analisis komparatif parametrik seperti Paired Sample t-Test tidak dapat digunakan, dan analisis wajib dialihkan menggunakan alternatif non-parametrik, yaitu Wilcoxon Signed-Rank Test.

Pengujian Hipotesis Komparatif (Wilcoxon Signed-Rank Test)

Uji pangkat bertanda Wilcoxon diaplikasikan untuk mengevaluasi apakah pergeseran angka rata-rata kinerja keuangan antara periode sebelum (2021–2022) dan sesudah (2024–2025) pengalihan dana ke KDMP statusnya signifikan atau sekadar fluktuasi statistik kebetulan. Hasil luaran pengujian komparatif non-parametrik tersebut disajikan secara lengkap pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Output Wilcoxon Signed-Rank Test.

Variabel Pengujian (Sesudah – Sebelum)	Berdasarkan (Ranks)	Peringkat	Nilai Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keputusan Statistik
Efektivitas Belanja Infrastruktur	6 Negative Ranks 0 Positive Ranks 0 Ties		-2,201	0,028	Tolak H ₀ , Terima H ₁
Rasio Efisiensi Biaya Operasional	0 Negative Ranks 6 Positive Ranks 0 Ties		-2,207	0,027	Tolak H ₀ , Terima H ₁

Sumber: Output SPSS Diolah (2026)

Melalui hasil pembacaan statistik pada Tabel 6, diperoleh temuan bahwa pada pengujian variabel Efektivitas Belanja Infrastruktur menghasilkan 6 Negative Ranks. Hal ini mengindikasikan secara mutlak bahwa seluruh lembang sampel (100%) mengalami penurunan drastis dalam pembiayaan pembangunan fisik pasca-adanya program KDMP. Nilai hitung Z tercatat sebesar -2,201 dengan tingkat signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,028. Karena nilai probabilitas ini jauh lebih kecil dari standar kekeliruan $\alpha = 0,05$ ($0,028 < 0,05$), secara hukum statistik diputuskan untuk menolak H₀ dan menerima H₁. Fenomena paralel

juga terlihat pada variabel Rasio Efisiensi Biaya Operasional yang menghasilkan 6 Positive Ranks. Indikator ini menegaskan bahwa seluruh objek penelitian mengalami pembengkakan inefisiensi belanja secara seragam tanpa terkecuali. Nilai hitung Z sebesar -2,207 didukung oleh tingkat signifikansi sebesar 0,027 ($0,027 < 0,05$), yang kembali memperkuat keputusan penolakan terhadap hipotesis nol (H_0).

Rangkaian pembuktian inferensial ini memberikan basis kesimpulan ilmiah yang sangat kokoh dan akuntabel. Kebijakan pengalihan Dana Desa untuk menyuplai modal Program Koperasi Desa Merah Putih secara nyata telah mendistorsi kesehatan fiskal pemerintahan desa di Kabupaten Toraja Utara. Intervensi kebijakan ini terbukti secara signifikan menurunkan kapasitas alokasi belanja infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, serta memicu inefisiensi anggaran yang serius akibat pembekuan kapital pada 6 organisasi koperasi baru yang faktual masih mati suri dan nihil aktivitas produktif.

Pembahasan

Signifikansi hasil pengujian statistik di atas menyingkapkan adanya anomali fungsional yang serius dalam tata kelola anggaran pemerintahan lembang di Kabupaten Toraja Utara. Penurunan drastis rata-rata efektivitas belanja infrastruktur dari 89,35% menjadi hanya 24,15% memvalidasi bahwa keluhan meluas yang disuarakan oleh masyarakat adat bukan sekadar gejala sosial tanpa dasar, melainkan akibat nyata dari kebijakan penyerapan Dana Desa yang dipaksakan. Ketika pos anggaran yang semula diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pengerasan jalan dipotong secara radikal untuk menyuplai modal pendirian 6 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang nyatanya hingga kini masih mati suri dan nihil kegiatan usaha, pemerintah lembang secara langsung telah menciptakan kondisi pembusukan modal (capital stagnation). Anggaran publik yang berstatus sebagai uang rakyat dibekukan dalam rekening lembaga komersial yang belum memiliki kesiapan ekosistem operasional, sehingga menghasilkan tingkat utilisasi nol persen yang mencederai prinsip keadilan distribusi fiskal.

Secara teoretis, realitas empiris ini memberikan kritik tajam sekaligus mendefinisikan ulang batas batasan penerapan Stewardship Theory dalam akuntansi sektor publik di negara berkembang. Teori ini mengasumsikan bahwa para birokrat lokal akan selalu bertindak sebagai pelayan (steward) yang arif demi menyelaraskan kemakmuran komunitas dengan kebijakan anggaran (Mardiasmo, 2024). Namun, kasus di Toraja Utara membuktikan bahwa di bawah tekanan instruksi birokrasi yang bersifat top-down, perangkat lembang mengalami disorientasi peran akibat terjebak dalam dilema akuntabilitas ganda. Demi mengejar target formalitas kepatuhan administratif supradesa, mereka terpaksa mengorbankan fungsi pelayanan prima (value for money) berupa penyediaan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian

warga. Pembengkakan rasio efisiensi biaya operasional hingga menembus angka 108,65% menjadi bukti tak terbantahkan mengenai tingginya biaya transaksi (transaction costs) yang harus ditanggung akibat adopsi kelembagaan yang prematur dan dipaksakan (Wibowo & Siregar, 2025).

Secara praktis, temuan ini memperkuat urgensi bahwa intervensi ekonomi di tingkat pedesaan tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan mekanistik-kuantitatif berupa penyuntikan modal finansial semata. Kegagalan operasional 6 KDMP perintis ini berakar pada absennya peta jalan (roadmap) pendampingan teknis dan rendahnya literasi manajerial pengurus di lapangan (Sukaris & Rahman, 2025). Ketika infrastruktur jalan pedesaan dibiarkan rusak parah, mobilitas komoditas unggulan daerah seperti kopi dan sayuran menjadi terhambat, yang pada gilirannya justru menurunkan kapasitas ekonomi domestik masyarakat. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini mendesak pemerintah daerah untuk segera menerapkan moratorium penyertaan modal KDMP yang mandek, serta merekomendasikan realokasi sisa anggaran kembali pada hakikat aslinya, yaitu pemulihan konektivitas jalan guna menjaga stabilitas sosial dan pemulihan kesejahteraan ekonomi warga lembang

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh aktualisasi diri dan beban kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada konteks tata kelola publik di Kabupaten Toraja Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan empiris yang kuat. Secara parsial, variabel aktualisasi diri terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai, sebagaimana ditunjukkan oleh sebesar 2,953 dan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyediaan ruang inovasi dan otonomi sangat krusial; ketika aparatur diberikan kebebasan mengaktualisasikan potensinya, mereka cenderung lebih adaptif dalam menghadapi krisis. Di samping itu, pengujian parsial terhadap variabel beban kerja juga memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja dengan nilai sebesar 2,862 dan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini merefleksikan bahwa pemberian volume kerja dan target operasional yang terstruktur bertindak sebagai katalisator produktivitas, sepanjang batasan perannya jelas.

Namun secara simultan, hasil pengujian menunjukkan bahwa aktualisasi diri dan beban kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai dengan nilai sebesar 10,276 dan signifikansi 0,000, berkontribusi sebesar 43,2 persen terhadap variasi prestasi kerja. Fakta makro ini menjelaskan fenomena riil di lapangan: adanya

pemotongan anggaran Dana Desa sebesar 58 persen pada tahun 2025 dan 2026 menciptakan beban kerja yang sangat ekstrem bagi 111 Lembang, sehingga memberangus ruang aktualisasi diri pegawai. Akibatnya, terjadi penurunan prestasi kerja kolektif yang ditunjukkan oleh mandeknya pembangunan fisik Gerai Kopdes, di mana baru 6 Lembang yang berhasil menyelesaikan konstruksi (meski belum beroperasi) sementara 105 Lembang lainnya belum memulai pembangunan. Secara keseluruhan, keseimbangan antara penataan beban kerja yang proporsional dan penyediaan wadah aktualisasi kompetensi di tengah keterbatasan anggaran menjadi pilar mutlak penentu optimalisasi kinerja birokrasi tingkat desa.

Saran

Bertolak dari kesimpulan kritis di atas, saran praktis yang mendesak ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara beserta para kepala lembang untuk segera menghentikan atau menerapkan moratorium total terhadap penyertaan modal bagi 6 KDMP yang mandek tersebut. Sisa anggaran Dana Desa wajib dialihkan dan dikembalikan segera ke pos semula, yaitu pemulihan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat adat. Selain itu, jika program ekonomi ini ingin dilanjutkan di masa depan, intervensi pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada aspek penyuntikan dana mekanistik, melainkan harus didahului dengan pelatihan literasi manajerial dan pendampingan bisnis yang matang bagi pengurus lokal. Bagi penelitian akademis selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokus amatan di luar Kabupaten Toraja Utara serta mengintegrasikan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat guna mengurai lebih dalam aspek sosiopolitik yang memicu terjadinya disorientasi alokasi anggaran sektor publik di tingkat pedesaan.

REFERENSI

- Buntu, L. (2024). Analisis laporan keuangan dana desa pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Terapan*, 11(2), 156–172. <https://doi.org/10.56326/jebd.v2i2.2919>
- Fitrianingsih, F., & Yusni, N. (2025). Prospects for massive development of Koperasi Desa Merah Putih in accelerating SDGs achievement in Indonesia. *Kajian: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(2), 89–104.
- Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486–489. <https://doi.org/10.5812/ijem.3505>
- Ghozali, I. (2024). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* (11th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). *Strategi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan literatur sistematis*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Koperasi Nusantara. (2023). Audit internal dan efektivitas operasional koperasi desa: Studi kasus KUD Hikmat. *Jurnal Koperasi Nusantara*, 8(1), 33–48.
- Kurniawan, R. (2026). Financial comparative analysis in public sector: Methodological review. *International Journal of Accountability and Public Budgeting*, 9(1), 14–29.
- Mardiasmo. (2024). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi di era otonomi desa*. Andi.
- Mishra, P., Pandey, C. M., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, 22(1), 67–73. https://doi.org/10.4103/aca.ACA_157_18
- Nugroho, A., & Pratama, Y. (2024). Desain eksperimen semu dan komparatif dalam evaluasi kebijakan fiskal desa. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 16(2), 75–88.
- Outright, J., et al. (2025). Pendampingan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih untuk mengatasi stagnasi kelembagaan. *Journal of Co-Operative Management*, 9(1), 45–62.
- Pratama, A., & Wijaya, B. (2026). Kelembagaan ekonomi lokal dan akselerasi kemandirian fiskal pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan Daerah*, 14(1), 112–127.
- Rizal, D., & Abdullah, M. (2025). Analisis peluang dan tantangan Koperasi Desa Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi desa. *Applied Economics*, 8(2), 112–128.
- Sanjaya, S. (2025). *Metodologi penelitian akuntansi dan bisnis: Teori dan praktis*. Salemba Empat.
- Sukaris. (2025). Analisis kinerja anggaran desa pada Lembang Rantebua Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara. *MASIP: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 7(1), 33–48.
- Sukaris, & Rahman, A. (2025). Penilaian kinerja kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih berbasis multi-dimensi untuk mewujudkan tata kelola koperasi modern. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 12(3), 245–262.
- Wibowo, H., & Siregar, M. R. (2025). Akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana desa pasca transformasi lembaga ekonomi keuangan mikro. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(2), 115–130. <https://doi.org/10.33701/jekp.v12i1.4590>
- World Bank. (2023). *Indonesia rural-urban inequality report*. World Bank.